

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling (BK) sebagai bagian integral dari proses pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kualitas pelayanan pendidikan pada siswa. Pelayanan BK merupakan proses pemberian bantuan (*helping*) terpadu yang bertujuan agar tercapainya perkembangan optimal individu. Fungsi dan kinerja konselor di sekolah akan tampak dalam kesanggupannya melakukan berbagai aktivitas yang khas tersebut dan akan membedakan dengan guru lainnya. (Schmidt, 2003 : 2) menyatakan konseling sebagai sebuah profesional merupakan suatu proses pembentukan hubungan dalam mengidentifikasi kebutuhan individu, bentuk strategi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta aktif membantu individu dalam membuat rencana dalam pembuatan keputusan, memecahkan masalah, mengembangkan kesadaran diri dan mengarahkan pada kehidupan yang sehat. Konselor di sekolah dituntut untuk ikut berperan aktif mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah, khususnya pada bidang BK. Bimbingan dan konseling (BK) yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu pelayanan dalam rangka upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa.

Isu pengembangan konselor sebagai profesi telah bergulir mulai pada tahun 2003, hal tersebut dibarengi dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN). Berbagai

kebijakan tersebut pada dasarnya ditanggapi beragam oleh berbagai pihak serta menghasilkan berbagai persepsi termasuk oleh konselor sendiri. Persepsi tersebut dapat menentukan bagaimana tanggapan, pemahaman maupun penafsiran konselor mengenai berbagai informasi tersebut baik pada dunia luarnya ataupun pada dirinya sendiri, dalam hal ini kebijakan tersebut adalah Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) edisi 2007.

Dirumuskannya Standar Kompetensi Konselor Indonesia pada tahun 2005 oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memberi angin segar bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia karena dengan adanya standar kompetensi konselor maka jaminan profesionalitas profesi akan terbentuk sehingga profesi bimbingan dan konseling dapat diakui secara profesional. Disisi lain dalam rumusan Standar Kompetensi Konselor mencantumkan poin-poin kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor, hal tersebut tentunya menuntut seorang konselor untuk memiliki kualifikasi-kualifikasi yang ada dalam dalam Standar Kompetensi Konselor tersebut jika ingin diakui sebagai seorang konselor yang kompeten.

Secara historis jaminan legalitas dan eksistensi profesi konselor di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik Adanya UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 yang mengisyaratkan tentang sertifikasi profesi guru termasuk untuk profesi konselor sendiri. Sertifikasi tersebut mengantarkan Asosiasi Bimbingan dan konseling (ABKIN) untuk menerbitkan Standar Kompetensi

Konselor Indonesia (SKKI) yang mengisyaratkan standar kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki konselor.

Implementasi penguasaan kompetensi dapat dilihat dari penampilan dan kinerja konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling (BK). Kompetensi konselor tersebut menjadi hal penting dalam pemberian pelayanan di sekolah sebagai gambaran realisasi derajat kinerja dari seorang konselor. Seorang konselor yang tidak menguasai keterampilan tersebut tentu akan ditanyakan kredibilitasnya. Oleh karena itu kompetensi menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan profesi konselor pada saat ini.

Dalam praktiknya di lapangan ternyata masih banyak ditemukan hambatan. Hal ini terbukti dengan masih adanya anggapan miring tentang BK dan kurangnya apresiasi yang proporsional dan profesional dari guru, guru mata pelajaran, ataupun wali kelas. Selain itu diduga mutu pelayanan BK masih merupakan konsep yang belum mantap karena masih belum secara tepat terlihat dalam ukuran dan tindakan yang nyata. Penelitian Moegiadi, dkk. serta Furqon (Supriatna, 1999: 4) tentang unjuk kerja lulusan BK dengan non BK dalam menyelenggarakan konseling ternyata didapat kesimpulan bahwa pada kedua kelompok tersebut tidak berbeda jauh dalam memberikan dan menampilkan aktivitas pelayanan BK secara menyeluruh serta belum menampilkan kompetensinya secara aktual.

Ilfiandra, dkk. (2006) yang mengungkapkan, kinerja konselor dalam mengimplementasikan pelayanan BK masih belum memuaskan, dan kelemahan kinerja konselor tersebut merata pada aspek keterampilan dan pengetahuan

tentang pelayanan BK dan kepribadian. Indikator kinerja konselor yang belum memuaskan berkenaan dengan keterampilan melakukan assesmen kebutuhan siswa, keterampilan mengembangkan instrumen data, pengembangan materi dan media pelayanan BK, inisiatif untuk mengembangkan kinerja profesional, keterampilan melakukan evaluasi pelayanan BK, pengetahuan tentang penelitian dan hasil penelitian terbaru tentang pelayanan BK, dan kemampuan pelayanan BK serta kemampuan empati terhadap siswa.

Juntika (1993) yang menemukan adanya kurang mampuan guru pembimbing (konselor) dalam menangani dan menggali masalah yang dihadapi siswa, kurangnya keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah dan adanya kecenderungan guru pembimbing untuk memaksakan kehendak kepada siswa, serta Asrori (1990 : 147) pun menemukan bahwa keterampilan konseling guru pembimbing (konselor) belum memenuhi harapan siswa.

Supriatna (1999: 76) menunjukan program yang dikembangkan oleh konselor SMU di kota Bandung masih belum didasarkan atas realitas yang objektif akan kondisi sekolah dan kebutuhan konseli, padahal pengembangan program BK merupakan salah satu fungsi konselor yang strategis dan menegaskan kinerja konselor serta memperlihatkan eksistensinya sebagai profesi. Supriadi (1990: 12) mengungkapkan bahwa 38% orang tua belum menerima keberadaan program bimbingan dengan alasan kurang profesionalnya guru pembimbing dalam menjalankan tugas. Fenomena tersebut menuntut dikembangkannya suatu program pengembangan kinerja dan kompetensi konselor agar keberadaan konselor dapat diakui secara profesional.)

Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) mengisyaratkan kompetensi yang harus dimiliki konselor. Salah Satu Standar Kompetensi yang harus dimiliki adalah SKKI adalah menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, kompetensi ini menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan kinerja konselor. Penyelenggaraan pelayanan BK menjadi salah satu bentuk kinerja yang secara nyata yang tentunya dapat membedakan konselor dengan profesi kependidikan lainnya.

Untuk mencapai kinerja profesi konselor yang optimal perlu ditunjang oleh : (1). Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilandasi oleh pengetahuan kerja dan profesional, (2). Berorientasi pada kebutuhan, (3). Membangun kerjasama yang baik dengan rekan sejawat (4). Memiliki kreativitas yang tinggi; (5) serta memiliki kualitas kerja yang memadai sesuai tuntutan profesional.

Sebagai individu konselor tidak dapat lepas dari karakteristik-karakteristik yang menyertainya, salah satu atribut psikologis yang dimiliki individu adalah persepsi. Melalui stimulus yang datang individu membangun persepsi mengenai dunianya sehingga menghasilkan pandangan, pemahaman, pengertian serta penafsiran tentang informasi tersebut. Berbagai informasi yang datang dapat dipersepsikan berbeda oleh individu sehingga dapat menjadi persepsi yang berbeda dari tiap individu yang menerima.

Persepsi sebagai proses psikologis pada individu dapat menghasilkan berbagai tanggapan, pandangan, ataupun penafsiran yang berbeda pada tiap individu. Persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan informasi yang datang (Rahmat, 1998 :51).

Istilah kompetensi dimaknai sebagai sebagai “*karakteristik individu yang melekat*”, kompetensi merupakan bagian dari kepribadian individu yang relatif dalam dan stabil, dan dapat dilihat serta diukur dari perilaku individu yang bersangkutan, di tempat kerja atau dalam berbagai situasi (Spencer, 1993:9). Kompetensi seorang individu akan menentukan derajat kinerja (*performance*) yang ditampilkannya sebagai realisasi dari tuntutan profesional dari profesinya tersebut.

Persepsi individu dapat menghasilkan pandangan tentang tanggapan tentang dunia luar ataupun tentang dirinya sendiri. Terkait dengan hal tersebut konselor sebagai individu tidak lepas dari proses persepsi. Sebagai sebuah profesi berbagai kebijakan dan informasi yang datang membentuk persepsi dalam diri konselor, baik persepsi terhadap dirinya sebagai konselor ataupun tentang dunia di luar dirinya. Dalam kajian profesi hal tersebut berimplikasi kepada pengembangan profesi konselor. Atas dasar uraian di muka maka penelitian ini diberi judul :

”Persepsi Konselor Tentang Penguasaan Kompetensi Yang Dimilikinya di SMA Negeri Kota Bandung”

B. Batasan Masalah

1. Batasan Konseptual

Manusia sebagai aspek sumber daya utama dalam suatu profesi pada dasarnya tidak dapat lepas dari proses psikologis yang menyertainya. Persepsi sebagai salah satu proses psikologis yang terjadi menyangkut keadaan atau kondisi lingkungan serta informasi yang diterima individu. Individu akan menghayati dan menilai hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang menunjang dengan apa yang individu lakukan.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungannya, baik melalui penglihatan, penghayatan, perasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah pemahaman, pengertian atau penafsiran terhadap sesuatu.

Kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik (*public trust*). Pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang kompeten dalam satu bidang tersebut tentunya akan dipercaya oleh masyarakat sebagai bentuk *public trust* dari mereka. *Public trust* akan menentukan definisi profesi serta memungkinkan anggota profesi tersebut dapat menjalankan fungsinya secara profesional. Dalam hubungan sebab akibat kompetensi dapat menjadi salah satu penentu hasil dari kinerja seorang individu secara profesional sebagai aktualisasi dari profesinya tersebut. Sebagai sebuah profesi, konselor harus memiliki sejumlah kompetensi agar menjadi makin kokoh dan mendapat kepercayaan publik (*public trust*).

Penelitian tentang persepsi dalam kompetensi konselor sebagai salah satu kajian profesi belum banyak dilakukan. Solehudin (1993) mengungkapkan ada pandangan dari para pakar bimbingan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan konselor maka semakin tinggi pula kualifikasi profesionalnya, konselor yang lebih tinggi kualifikasi profesionalnya dipersyaratkan untuk menguasai kompetensi konselor seluruhnya disamping menguasai kompetensi lain yang dipersyaratkan. Hal tersebut mendorong kita untuk melakukan kajian serta penelitian kembali mengenai kompetensi maupun kaitannya dengan kinerja yang ditampilkan oleh konselor di lapangan.

Dari kompetensi yang tercantum dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), penelitian ini akan mengkaji persepsi konselor tentang penguasaan kompetensi yang tercantum dalam SKKI edisi bulan desember 2007.

2. Batasan Kontekstual

Penelitian ini akan mengkaji persepsi konselor tentang kompetensi yang dimiliki konselor di SMA Negeri kota Bandung. Uraian mengenai kompetensi konselor menjadi hal yang penting karena kompetensi harus dimiliki seorang konselor sebagai sebuah bentuk kinerja konselor di lapangan. Penelitian ini akan memfokuskan pada deskripsi persepsi konselor terhadap kompetensi yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) edisi Desember 2007.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana profil persepsi konselor tentang penguasaan kompetensi yang dimilikinya di SMA Negeri Kota Bandung ?
 2. Bagaimana profil konselor tentang kompetensi yang dimilikinya berdasarkan jenis kelamin, hal ini merujuk pada pendapat Adler dkk (1983 : 65) yang menyebutkan bahwa adanya perbedaan persepsi berfikir antara laki-laki dan perempuan karena adanya perbedaan-perbedaan faktor-faktor psikologis yang dimilikinya, sedangkan untuk latar belakang pendidikan, lama pengalaman kerja, berdasar pada pendapat Kretch dan Crutchfield yang mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor fungsional merupakan faktor yang berhubungan dengan *need*, pengalaman masa lalu dan proses belajar atau dengan kata lain faktor fungsional merupakan himpunan dari fungsi-fungsi psikologis yang terjadi pada diri individu.
-

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil persepsi konselor tentang penguasaan kompetensi yang dimilikinya di kota Bandung
2. Mengetahui profil persepsi konselor tentang kompetensi yang dimilikinya berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lama pengalaman kerja

E. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Menambah informasi isu-isu perkembangan kompetensi konselor khususnya dalam perkembangan profesi konselor di Indonesia.
2. Menemukan dasar-dasar konseptual yang berimplikasi metodologis bagi studi tentang persepsi, kompetensi konselor dan berbagai variabel yang terkait.
3. Sebagai bahan informasi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pembuat kebijakan baik itu oleh organisasi profesi maupun LPTK penghasil tenaga konselor.

F. Asumsi

Penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Persepsi diartikan sebagai proses kognitif pemberian arti terhadap lingkungannya oleh seorang individu (Gibson dan Donely, 1996 : 53)
-

2. Kompetensi menjadi hal yang penting karena menentukan derajat kinerja (*performance*) sehingga seorang individu yang dapat digambarkan dalam hubungan kausalitas (Spencer, 1993:12).
 3. Spencer (1993:9-23) mengemukakan kompetensi dapat bersumber dari lima jenis sumber kompetensi dan salah satunya adalah konsep diri. Konsep diri erat kaitannya dengan persepsi diri terhadap dirinya sendiri (*self-perseption*).
 4. Dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) edisi 2007 tercantum berbagai kompetensi yang harus dimilikinya, oleh karena itu hal tersebut merupakan yang penting bagi konselor sebagai tenaga profesional
-